

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN
BELANJA PADA BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN 2020 - 2022**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
SARJANA EKONOMI (SE)
Pada Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh**

Oleh

**DERY OKTARIANA
NPM : 2002110055**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
BANDA ACEH
2024**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA

TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092

BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 05 Agustus 2024

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

DERI OKTARIANA

NPM : 2002110055

Dengan judul:

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN
BELANJA PADA BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA (BKPSDM) KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2020 - 2022**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

Ketua Program Studi
Akuntansi

Budi Safatul Anam, S.E., M.Si., Ak
NIK. 19740607 201709 1 001

Pembimbing I

Mulyadi AR, S.E., M.Si
NIK. 19620917 200204 1 001

Pembimbing II

Surya Fatma, S.E., M.Si
NIK. 19651031 199406 2 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi



Drs. H. Farnizi Gadeng, SE., M.Si., MM
NIK. 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 05 Agustus 2024

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

DERI OKTARIANA
NPM : 2002110055

Dengan judul:

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN
BELANJA PADA BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA (BKPSDM) KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2020 - 2022**

Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian, pada tanggal 03 Agustus 2024

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua

Drs. H. Tarmizi Gadeng, S.E., M.Si., M.M
NIK. 19700408 199401 1 001

Sekretaris

Budi Safatul Anam, S.E., M.Si
NIK. 19740607 201709 1 001

Anggota

Mulyadi AR, S.E., M.Si
NIK. 19620917 200204 1 001

Anggota

Surya Fatma, S.E., M.Si
NIK. 19651031 199406 2 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi



Budi Safatul Anam, S.E., M.Si., Ak
NIK. 19740607 201709 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 05 Agustus 2024

Yang Menyatakan



Deri Oktariana

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Deri Oktariana
NPM : 2002110055
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eksklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFESIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA PADA BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM) KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2020 - 2022

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 05 Agustus 2024

Yang Menyatakan,


Deri Oktariana

KATA PENGANTAR

Assalamulaikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Aceh Barat Daya”**.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, pengarahan, dan dukungan yang sangat berarti dari berbagai pihak yang dengan ketulusan, kasih sayang, dan pengorbanannya memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya Dedi Afrizal dan Sabriatinur dan adikku Rico Saputra yang telah memberikan doa, kasih sayang, perhatian dan pengorbanan moral dan material yang tidak terkira.
2. Allah SWT. Atas segala limpahan rahmad, hidayah, serta karunia-Nya, yang telah memberikan mukjizat serta kekuatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Aslam Nur, M.A, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, S.E., M.Si., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

5. Ibu Syamsidar, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
6. Bapak Budi Safatul Anam, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
7. Ibu Elviza, S.E., M.Si selaku Ketua Laboratorium Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
8. Bapak Mulyadi AR, S.E., M.Si dan Surya Fatma, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan dorongan dan arahan dari merencanakan hingga selesainya penelitian ini.
9. Seluruh Dosen, staf pengantar, karyawan di Universitas Muhammadiyah Aceh.
10. Kepada Dinas Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia yang telah mengizinkan melakukan penelitian.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, Januari 2024

Deri Oktariana

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	6
 BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	
2.1 Landasan Teoritis	7
2.1.1 Konsep Anggaran Belanja.....	7
2.1.2 Anggaran Oprasional	9
2.2 Efektivitas	10
2.2.1 Pengertian Efektivitas	10
2.2.2 Pengukuran Efektivitas	11
2.3 Efisiensi	12
2.3.1 Pengertian Efisiensi	12
2.3.2 Pengukuran Efisiensi	13
2.4 Penelitian Sebelumnya	14
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian	19
3.1.1 Tujuan Studi	19
3.1.2 Jenis Investigasi	19
3.1.3 Tingkat Intervensi Peneliti	19
3.1.4 Pengaturan Studi	19
3.1.5 Unit Analisis	20
3.1.6 Horizon Waktu	20
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	20
3.3 Definisi dan Oprasionalisasi Topik	22
3.4 Teknik Analisis Data	23
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum BPSDM Aceh Barat Daya	27
4.1.1 Sejarah Singkat BPSDM Aceh Barat Daya	27
4.1.2 Visi dan Misi BPSDM Aceh Barat Daya	28
4.1.3 Tugas dan Fungsi BPSDM Aceh Barat Daya	30
4.2 Hasil Penelitian	34
4.2.1 Analisis Rasio Keuangan BPSDM Aceh Barat Daya ...	34
4.2.1.1 Rasio Efektivitas	34
4.2.1.2 Rasio Efisiensi	35
4.3 Analisis dan Evaluasi	38

4.3.1 Analisis Efektivitas Anggaran BPSDM Aceh Barat Daya.	38
4.3.1.1 Analisis Efisiensi Anggaran BPSDM Aceh Barat Daya.	39
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	42
5.2 Saran	42
DAFTAR PUSTAKA	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Anggaran Belanja pada BKPSDM Aceh Barat Daya	3
Tabel 2.1	Kriteria Efektivitas	12
Tabel 2.2	Kriteria Efisiensi	14
Tabel 2.3	Penelitian Sebelumnya	16
Tabel 3.1	Oprasionalisasi Topik	22
Tabel 4.1	Anggaran dan Realisasi BKPSDM Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2020-2022	35
Tabel 4.2	Anggaran dan Realisasi BKPSDM Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2020-2022	36
Tabel 4.3	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Anggaran BPSDM Aceh Barat Daya	38
Tabel 4.4	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Anggaran BPSDM Aceh Barat Daya	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Sruktur Organisasi BKPSDM Kabupaten Aceh Barat Daya	28
------------	---	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Realisasi Anggaran Berdasarkan Program/Kegiatan Tahun 2020
- Lampiran 2 Realisasi Anggaran Berdasarkan Program/Kegiatan Tahun 2021
- Lampiran 3 Realisasi Anggaran Berdasarkan Program/Kegiatan Tahun 2022

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN
BELANJA PADA BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN 2020 - 2022**

**DERI OKTARIANA
NPM: 2002110055**

Pembimbing I: Mulyadi AR,S.E.,M.Si
Pembimbing II: Surya Fatma,S.E.,M.Si

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran belanja pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Barat Daya. Adapun metodologi penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis anggaran belanja pada BKPSDM Aceh Barat Daya Tahun 2020-2022. Perkembangan tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran BKPSDM Aceh Barat Daya Tahun 2020 dan 2022 dengan nilai “Efektif” (93,90% dan 90,63%) dan Tahun 2021 dengan nilai “Cukup Efisien” (80,70%). Hal ini dikarenakan ada beberapa aktivitas yang di anggarakan tidak terlaksana. Perkembangan tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran BKPSDM Aceh Barat Daya Tahun 2020-2022 dengan nilai Kurang Efisien (99,29% , 93,21% dan 91,20). Hal ini dikarenakan pengelolaan anggaran belanja belum berhasil memenuhi syarat efisiensi yaitu pengguna dana yang minimum untuk mencapai hasil yang maksimal.

Kata kunci : (Efektivitas, Efisiensi, Anggaran Belanja)

***ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF THE
IMPLEMENTATION OF THE SPENDING BUDGET IN THE HUMAN RESOURCES
DEVELOPMENT PERSONNEL AGENCY (BKPSDM)
SOUTHWEST ACEH DISTRICT
YEAR 2020-2022***

**DERI OCTARIANA
NPM: 2002110055**

Supervisor I: Mulyadi AR,S.E.,M.Si
Supervisor II: Surya Fatma,S.E.,M.Si

ABSTRACT

This research aims to determine and analyze the level of efficiency and effectiveness of budget management at the Southwest Aceh Human Resources Development Agency (BKPSDM). The research methodology uses a qualitative approach, namely by identifying and analyzing the expenditure budget at BKPSDM Aceh Barat Daya 2020-2022. Development of the level of effectiveness of the Southwest Aceh BKPSDM budget implementation in 2020 and 2022 with a value of "Effective" (93.90% and 90.63%) and in 2021 with a value of "Quite Efficient" (80.70%). This is because several activities that were budgeted were not carried out. Development of the level of efficiency in implementing the Southwest Aceh BKPSDM budget for 2020-2022 with Less Efficient values (99.29%, 93.21% and 91.20). This is because budget management has not succeeded in meeting efficiency requirements, namely using minimum funds to achieve maximum results.

Keywords: (Efficiency, Effectiveness, Shopping Budget)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Anggaran pemerintah terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik masyarakat. Anggaran publik merupakan alat perencanaan sekaligus alat pengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan. Melalui data rekening belanja yang terdapat dalam anggaran belanja lembaga/organisasi pemerintah, akan dilihat apakah anggaran yang telah dibuat dapat berperan sebagai pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Anggaran belanja merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Anggaran belanja digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Efektivitas dan efisiensi anggaran belanja merupakan hal yang penting untuk diperhatikan oleh pemerintah daerah. Efektivitas anggaran belanja berkaitan dengan pencapaian tujuan dari kegiatan yang dibiayai oleh anggaran tersebut. Sedangkan efisiensi anggaran belanja berkaitan dengan penggunaan sumber daya anggaran secara minimal untuk mencapai hasil yang maksimal.(M.Syafii Antonio,2018)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan. Undang-Undang ini menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional mencakup tata cara perencanaan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Perencanaan pembangunan yang dihasilkan oleh undang-undang ini harus dilaksanakan di tingkat pusat dan daerah, menekankan pentingnya koordinasi dan implementasi rencana pembangunan di seluruh wilayah negara. Hal ini menunjukkan pentingnya menyelaraskan kebijakan dan program pemerintah dengan rencana pembangunan yang telah disusun.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan salah satu instansi daerah yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. BKPSDM bertanggung jawab untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, dan pembinaan aparatur sipil negara. Dalam proses penganggaran terdiri dari beberapa prinsip, yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Dengan adanya diterapkannya prinsip-prinsip tersebut, maka akan menghasilkan pengelolaan keuangan daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat daerah setempat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Dengan demikian akan melahirkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan anggaran belanja memiliki peran strategis dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas pelayanan publik. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai

entitas pemerintahan memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola anggaran untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan.

Dalam rangka memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, diperlukan analisis yang komprehensif terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran belanja selama tahun 2020 - 2022. Berikut ditampilkan laporan realisasi anggaran belanja Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Barat Daya (BKPSDM) Tahun Anggaran 2020 - 2022:

Tabel 1.1
Anggaran Belanja pada BKPSDM Aceh Barat Daya

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggran (Rp)	Selisih anggaran (Rp)	Persentase Anggaran (%)
1	2020	3.623.466.146	3.402.530.323	220.935.823	93,90
2	2021	6.717.912.741	5.891.477.616	826.435.125	87,70
3	2022	6.142.181.056	5.566.977.948	575.203.108	90,64

Sumber : BKPSDM,Aceh Barat Daya (2024)

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa anggaran belanja Berdasarkan tabel diatas, memperlihatkan rencana anggaran Tahun 2020 rencana anggaran total Rp3.623.466.146 terealisasi sebesar Rp3.402.530.323 atau (93.90%). Pada Tahun 2021 rencana anggaran Rp6.717.912.741 terealisasi sebesar Rp5.891.477.616 atau (87.70%). Dan pada Tahun 2022 rencana anggaran sebesar Rp6.142.181.056 dan terealisasinya sebesar Rp5.566.977.948 atau (90.64%), umumnya hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang terealisasi tidak mampu menyerap seluruh anggaran yang ada disebabkan karena adanya program kegiatan yang tidak terlaksanakan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) memegang peran strategis dalam manajemen sumber daya manusia di

suatu daerah. Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai contoh wilayah, memiliki kebutuhan yang terus berkembang dalam pengembangan SDM untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, analisis efektivitas dan efisiensi anggaran belanja pada BKPSDM menjadi suatu aspek krusial yang perlu diteliti. Berdasarkan uraian dan fenomena masalah yang telah dipaparkan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **"Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020 - 2022"**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020 – 2022.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020 -2022 agar efektif dan efisien.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan informasi yang akurat dan *valid*, disamping itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan di antaranya:

1. Kegunaan Akademis

- a) Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan tentang anggaran pemerintah khususnya anggaran belanja dan wawasan mengenai anggaran belanja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Aceh Barat Daya.
- b) Menambah literatur dan acuan penelitian pada bidang manajemen keuangan khususnya analisis anggaran belanja sehingga dapat dijadikan bahan keputusan atau referensi, terutama untuk peneliti yang ingin melakukan penelitian dimasa yang akan datang.
- c) Dapat menambah dan mengembangkan wawasan peneliti khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan pemerintah khususnya pada anggaran belanja pemerintah dengan cara membandingkan teori yang diperoleh dengan kenyataan atau kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan.

2. Kegunaan Praktis

- a) Agar dapat memberikan kemudahan dan pemanfaatan bagi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Aceh Barat Daya dalam mengawasi keadaan finansial sehingga dapat memaksimalkan anggaran belanja.

- d) Sebagai bahan evaluasi terhadap keadaan kinerja keuangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Aceh Barat Daya.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini yaitu hanya meneliti tentang efektivitas dan efisiensi anggaran belanja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Aceh Barat Daya. Tahun 2020 - 2022.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Konsep Anggaran Belanja

Anggaran merupakan suatu alat untuk perencanaan dan pengawasan operasi keuntungan dalam suatu organisasi laba dimana tingkat formalitas suatu biaya tergantung besar kecilnya organisasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut tentu saja diperlukan rencana pengelolaan yang matang dan efisien.(Zulia Hanum,2011)

Dengan demikian dari gambaran tersebut dapat terasa pentingnya suatu perencanaan dan pengawasan yang baik hanya dapat diperoleh manajemen dengan mempelajari, menganalisa dan mempertimbangkan dengan seksama kemungkinan-kemungkinan, alternatif-alternatif dan konsekuensi yang ada sehingga dapat didefinisikan sebagai berikut:

"*Budget* (anggaran) adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis dan *realistis*, yang mencakup seluruh kegiatan perusahaan, untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.(Mardiasmo,2020). Buku yang berjudul "Teknologi Keuangan" budgeting adalah suatu proses perencanaan keuangan yang sistematis dan formal untuk periode tertentu di masa depan, yang disusun dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi.(Supriyanto,2020)

Sonny Sumarsono (2010:79-80)/ Mengatakan bahwa anggaran memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi otorisasi

Fungsi ini mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat.

2. Fungsi perencanaan.

Anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk mendukung pembelanjaan tersebut.

3. Fungsi pengawasan

Anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4. Fungsi alokasi

Anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

5. Fungsi distribusi

EKONOM Kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

6. Fungsi stabilisasi

Anggaran menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Adapun tujuan penyusunan anggaran adalah:

1. Untuk menyatakan harapan/sasaran perusahaan secara jelas dan formal, sehingga bisa menghindari kerancuan dan memberikan arah terhadap apa yang hendak dicapai manajemen.
2. Untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait sehingga anggaran dimengerti, didukung, dan dilaksanakan.

3. Untuk menyediakan rencana terinci mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan perusahaan.
4. Untuk mengkoordinasikan cara/metode yang akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumber daya.
5. Untuk menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja individu dan kelompok, serta menyediakan informasi yang mendasari perlu-tidaknya tindakan

2.1.2 Anggaran Operasional

Pada dasarnya suatu perusahaan mempunyai tujuan untuk memperoleh laba atau penghasilan. Namun, semakin kompleksnya suatu masalah dalam perusahaan dapat mengakibatkan banyaknya aktivitas yang harus dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang tepat dan cermat, karena dengan dilaksanakannya rencana yang matang dalam setiap kegiatan operasionalnya, maka akan memudahkan perusahaan mencapai tujuan yang optimal. Anggaran Operasional merupakan salah satu alat dalam merencanakan dengan matang setiap kegiatan operasional perusahaan. Anggaran operasional sendiri memiliki banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli:

Anggaran operasional merupakan rencana kegiatan perusahaan yang ditangani oleh masing-masing departemen perusahaan, misalnya departemen produksi, departemen pemasaran, departemen keuangan, departemen research and development, departemen administrasi, departemen personalia dan lain- lain. Menurut M.Fuad, dkk (2020:20)

Anggaran operasional merupakan deskripsi rinci pendapatan dan biaya yang dibutuhkan untuk mencapai hasil laba yang memuaskan. Dan operating budget berisi tentang rencana kegiatan-kegiatan perusahaan selama periode tertentu yang akan datang, baik kegiatan yang berhubungan dengan sektor penghasilan maupun kegiatan yang berhubungan dengan sektor biaya. Menurut Didit Herlianto (2011:16)

Untuk mencapai tujuan tersebut manajemen dalam mengelola perusahaan. harus membuat perencanaan, pengendalian, pengawasan yang tepat dan cermat terhadap seluruh aktivitas perusahaan. Disamping hal tersebut manajemen juga harus dapat mengelola sumber-sumber ekonomi perusahaan secara efisien dan efektif. Perencanaan, pengendalian, dan pengawasan oleh manajemen perusahaan dapat disajikan dalam bentuk anggaran, baik anggaran yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang.

2.2 Efektivitas

2.2.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas yakni pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Maka di dalam proses penganggaran mulai diarahkan untuk berorientasikan pada keluaran (*output*) dan dampak (*outcome*) melalui pengukuran efektivitas. (Mardiasmo, 2014:132)

Efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan dibandingkan dengan target yang

ditetapkan berdasarkan potensi pemerintah daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila mencapai minimal sebesar satu atau seratus persen. Namun demikian semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan pemerintah daerah yang semakin baik. Menurut Halim (2012:178)

Berdasarkan pendapat para ahli, maka dapat ditarik kesimpulan. bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi tersebut telah mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut sudah dikatakan berjalan secara efektif. Efektivitas juga dapat dilihat dari hasil kegiatan yang telah diperoleh. Jika hasil kegiatan yang diperoleh sudah mendekati sasaran, maka akan semakin tinggi juga efektivitasnya. Efektivitas berkaitan dengan terlaksana semua tugas-tugas pokok, ketepatan waktu, ketercapaiannya suatu tujuan, serta keberhasilan. keterkaitan antara tujuan dan hasil yang diperoleh, yang menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan dengan hasil yang dicapai.

2.2.2 Pengukuran Efektivitas

Untuk mencari tingkat efektivitas yaitu melalui perbandingan antara realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Untuk mengukur tingkat efektivitas anggaran belanja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber : Mahsun (2014:84)

Sebagai pedoman untuk melihat tingkat efektivitas anggaran belanja langsung, maka dapat dijelaskan pada Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Kriteria Efektivitas

No	Persentase	Kriteria
1	> 100%	Sangat Efektif
2	90%-100%	Efektif
3	80%-90%	Cukup Efektif
4	60%-80%	Kurang Efektif
5	<60%	Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri No.690.900-327,1996.

2.3 Efisiensi

2.4.1 Pengertian Efisiensi

Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang di kaitkan dengan standar kinerja atau anggaran yang telah di tetapkan. Analisis efisiensi pengelolaan anggaran dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dari suatu pelaksanaan kegiatan atau proyek dengan melakukan perbandingan antara output dan input. Analisis yang dilakukan terhadap kinerja keuangan dengan menggunakan ukuran tingkat efisiensi yaitu perbandingan antara realisasi pengeluaran rutin dengan total realisasi pendapatan daerah dikalikan seratus dalam bentuk persentase. (Mardiasmo;2014:8)

Semakin kecil rasio efisien berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara hemat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk meralisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut

efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan pendapatannya kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan anggaran penerimaan pendapatannya itu lebih besar dari pada realisasi pendapatan yang diterima. (Mahmudi;2013:67)

2.4.2 Pengukuran Efisiensi

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan cara membandingkan antara output yang dihasilkan dengan input yang telah digunakan. Dikatakan efisien apabila hasil kerja mencapai penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Untuk mengukur tingkat efisien yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi anggaran belanja langsung (pengeluaran seluruh biaya yang digunakan untuk membiayai suatu kegiatan/program di instansi selama tahun berjalan) dengan realisasi anggaran belanja secara keseluruhan selama tahun berjalan.

Menggunakan rumus realisasi anggaran belanja langsung karena belanja langsung memiliki keterkaitan secara langsung dengan kegiatan/program yang telah dilaksanakan. Jadi jumlah realisasi belanja langsung akan berubah setiap tahunnya sedangkan belanja tidak langsung jumlahnya cenderung tetap, meskipun mengalami perubahan yang tidak terlalu signifikan dan belanja langsung juga tidak memiliki keterkaitan dengan program maupun kegiatannya dalam tahun berjalan.

Untuk mencari tingkat efisiensi yaitu melalui perbandingan antara realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja. Untuk mengukur tingkat efektivitas anggaran belanja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber : Mahsun (2014:84)

Sebagai pedoman untuk melihat tingkat keefisienan anggaran belanja, maka dapat dijelaskan pada Tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Kriteria Efisien

No	Persentase	Kriteria
1	>100%	Tidak Efisien
2	90%-100%	Kurang Efisien
3	80%-90%	Cukup Efisien
4	60%-80%	Efisien
5	<60%	Sangat Efisien

Sumber : Kepmendagri No.690.900-327,1996

2.4 Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya penting untuk ditampilkan sebagai referensi dan untuk mengetahui permasalahan yang dikaji oleh peneliti sebelumnya terkait dengan permasalahan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2023) berjudul "Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Daerah BPKAD Kabupaten Bojonegoro 2018-2022". Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi anggaran belanja daerah BPKAD Kabupaten Bojonegoro selama periode 2018-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas anggaran belanja daerah BPKAD Kabupaten Bojonegoro tergolong cukup efektif, dengan rata-rata persentase capaian target sebesar 85,71%. Sedangkan tingkat efisiensi anggaran belanja daerah BPKAD Kabupaten Bojonegoro tergolong efisien, dengan rata-rata persentase efisiensi sebesar 67,78%.

Penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2022) berjudul "Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Manado". Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi anggaran belanja BAPPEDA Kota Manado selama periode 2019-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas anggaran belanja BAPPEDA Kota Manado tergolong cukup efektif, dengan rata-rata persentase capaian target sebesar 82,74%. Sedangkan tingkat efisiensi anggaran belanja BAPPEDA Kota Manado tergolong efisien, dengan rata-rata persentase efisiensi sebesar 65,85%.

Penelitian yang dilakukan Rahmawati (2022), Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi anggaran belanja dalam rangka mengukur penyerapan anggaran belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas anggaran belanja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro secara umum sudah baik, dengan pencapaian target kinerja yang cukup tinggi. Namun, efisiensi anggaran belanja masih perlu ditingkatkan, dengan tingkat penyerapan anggaran yang masih rendah.

Novia Dhiniharitsa (2021), Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman Periode 2017-2020. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi anggaran belanja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman periode 2017-2020. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa efektivitas anggaran belanja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman secara umum sudah baik, dengan pencapaian target kinerja yang cukup tinggi. Namun, efisiensi anggaran belanja masih perlu ditingkatkan, dengan tingkat penyerapan anggaran yang masih rendah.

Tiara Rindhi Rifana (2021), Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2017-2019. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi anggaran belanja pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2017-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas anggaran belanja pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara umum sudah baik, dengan pencapaian target kinerja yang cukup tinggi. Namun, efisiensi anggaran belanja masih perlu ditingkatkan, dengan tingkat penyerapan anggaran yang masih rendah. Secara ringkas hasil penelitian sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Judul Penelitian/Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
-----------	-------------------------------	--------------------------	-------------------------	------------------	------------------

1	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Daerah BPKAD Kabupaten Bojonegoro 2018-2022". Rahmawati (2023)	Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas anggaran belanja daerah BPKAD Kabupaten Bojonegoro tergolong cukup efektif, dengan rata-rata persentase capaian target sebesar 85,71%. Sedangkan tingkat efisiensi anggaran belanja daerah BPKAD Kabupaten Bojonegoro tergolong efisien, dengan rata-rata persentase efisiensi sebesar 67,78%.	Variabel penelitian, teknik analisis data dan teknik pengumpulan data	Sampel penelitian dan lokasi penelitian
---	--	---	---	---	---

No	Judul Penelitian/Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
2	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Manado Astuti (2022)	Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas anggaran belanja BAPPEDA Kota Manado tergolong cukup efektif, dengan rata-rata persentase capaian target sebesar 82,74%. Sedangkan tingkat efisiensi anggaran belanja BAPPEDA Kota Manado tergolong efisien, dengan rata-rata persentase efisiensi sebesar 65,85%.	Variabel penelitian, teknik analisis data dan teknik pengumpulan data	Sampel penelitian dan lokasi penelitian

3	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro. Rahmawati (2022)	Penelitian Deskriptif untuk menganalisis Data	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas anggaran belanja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro secara umum sudah baik, dengan pencapaian target kinerja yang cukup tinggi. Namun, efisiensi anggaran belanja masih perlu ditingkatkan, dengan tingkat penyerapan anggaran yang masih rendah	Variabel penelitian, teknik analisis data dan teknik pengumpulan data	Sampel penelitian dan lokasi penelitian
---	--	---	--	---	---

Tabel Lanjutan 2.1

No	Judul Penelitian/Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
----	------------------------	-------------------	------------------	-----------	-----------

4	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman Periode 2017-2020. Novia Dhiniharitsa (2021)	Penelitian Deskriptif untuk menganalisis Data	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas anggaran belanja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman secara umum sudah baik, dengan pencapaian target kinerja yang cukup tinggi. Namun, efisiensi anggaran belanja masih perlu ditingkatkan, dengan tingkat penyerapan anggaran yang masih rendah.	Variabel penelitian, teknik analisis data dan teknik pengumpulan data	Sampel penelitian dan lokasi penelitian
5	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2017-2019. Tiara Rindhi Rifana (2021)	Penelitian Deskriptif untuk menganalisis Data	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas anggaran belanja pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara umum sudah baik, dengan pencapaian target kinerja yang cukup tinggi. Namun, efisiensi	Variabel penelitian, teknik analisis data dan teknik pengumpulan data	Sampel penelitian dan lokasi penelitian

Sumber : Data diolah (2023)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian adalah suatu rencana untuk pengumpulan, pengukuran, dan analisis data yang dibutuhkan untuk memperoleh solusi guna mempercepat laju dari proyek penelitian, berdasarkan pertanyaan penelitian dari studi(Sekaran dan Bougie 2019:109)

3.1.1 Tujuan Studi

Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Aceh Barat Daya.

3.1.2 Jenis Investigasi

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu digunakan untuk membahas dan menerangkan hasil penelitian dengan mempertimbangkan sistem dan pengendalian intern perusahaan dengan menggunakan keterangan-keterangan yang tidak berbentuk angka.

3.1.3 Tingkat Intervensi Peneliti

Tingkat intervensi peneliti dalam penelitian ini adalah intervensi minimal dimana peneliti melakukan penelitiannya tanpa mengintervensi aktivitas normal pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Aceh Barat Daya.

3.1.4 Pengaturan Studi

Dalam penelitian ini diperlukan data yang sebenarnya yaitu dari Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Aceh Barat Daya.

3.1.5 Unit analisis

Data yang diperoleh secara individu dimanfaatkan untuk mengukur analisis pada tingkat akumulasi yang lebih tinggi. Ciri khas dari tingkat analisis ini adalah inklusi tingkat yang lebih rendah ke dalam tingkat yang lebih tinggi. Sifat informasi yang terkumpul, bersama dengan tingkat di mana data diakumulasi untuk analisis, menjadi bagian integral dari keputusan yang diambil dalam menentukan unit analisis. Dalam konteks penelitian ini, unit analisis yang diberlakukan adalah bidang keuangan.

3.1.6 Horizon waktu

Menurut Sugiyono (2018:6) deret waktu (*time series*) adalah serangkaian nilai-nilai variabel yang disusun berdasarkan waktu. Analisis *time series* mempelajari pola gerakan nilai-nilai variabel pada satu interval waktu (misalnya minggu, bulan, tahun) yang teratur. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa pola lama akan terulang. Sejalan dengan berlangsungnya perubahan waktu. Peneliti mungkin ingin mempelajari fenomena lebih dari satu batas waktu dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian.

3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini melalui dari tahapan penelitian, yaitu:

1. Tinjauan Kepustakaan (*Library Research*)

Tinjauan pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan mempelajari literatur-literatur yang ada berupa buku-buku, karya ilmiah, jurnal atau artikel-artikel terkait, serta mengakses *website* dan situs-situs yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian

2. Studi Lapangan

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data yang diperlukan dengan melakukan pengamatan langsung yang dijadikan objek penelitian untuk mendapat informasi atau data yang berguna untuk penulis dalam penelitian lapangan dilakukan dengan cara

a. Wawancara

Melakukan Tanya jawab langsung kepada responden atau pihak yang terkait dalam perusahaan untuk memberikan informasi tentang masalah yang berkaitan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang gambaran umum perusahaan, kinerja keuangan daerah, serta unsur-unsur yang terkait dengan kinerja keuangan daerah Sugiyono (2012:197) wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya Pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

b. Observasi

Melakukan Pengamatan Langsung terhadap objek yang diteliti sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencatat data-data dari dokumen perusahaan berkaitan dengan objek penelitian. Dokumentasi sangat berguna karena untuk mengetahui informasi tentang data-data yang akan di pakai sebagai bukti dalam penelitian

3.3 Definisi dan Operasionalisasi Topik

Definisi operasional adalah rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembahasan dan penelitian karya ilmiah. menurut Nani Darmayanti (dalam Muslih 2013).

Definisi Operasional dalam Penelitian ialah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau suatu kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015).

Jadi dapat disimpulkan operasional adalah definisi yang didasarkan atas topik yang diamati. operasional mencakup hal-hal penting dalam penelitian yang memerlukan penjelasan yang dianggap penting. Operasionalisasi Topik dalam penelitian ini dapat diperoleh dengan menunjukkan Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Operasionalisasi Topik

Topik	Definisi	Indikator
Efektivitas Penilaian Anggaran	Efektifitas berkaitan dengan pengukuran seberapa tepat dalam mencapai target, yaitu dengan membandingkan hasil yang ditargetkan dengan realisasinya.	$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$ Kriteria Efektifitas: - 100% keatas sangat efektif - 90% sampai 100% efektif - 80% sampai 90% cukup efektif - 60% sampai 80% kurang efektif - Kurang dari 60% tidak efektif

Topik	Definisi	Indikator
Efisiensi Penilaian Anggaran	Efisiensi berhubungan dengan pengukuran seberapa besar cara yang digunakan, yang membandingkan <i>input</i> dengan <i>output</i> .	$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$ Kriteria Efisiensi; - 100% keatas tidak efisien - 90% sampai 100% kurang efisien - 80% sampai 90% cukup efisien - 60% sampai 80% efisien - Kurang dari 60% sangat efisien

Sumber :BKPSDM, Aceh Barat Daya (2024)

3.4 Teknik Analisis Data

Berdasarkan pada tujuan dan hipotesis yang diungkapkan dalam penelitian ini, maka metode analisis data yang dapat diterapkan adalah analisis regresi berganda. Dilihat dari jenis penelitian ini yang merupakan penelitian korelasi, metode analisis data dengan menerapkan analisis regresi berganda menjadi suatu pilihan yang patut digunakan.

Melalui analisis ini dapat dilihat pengaruh atau hubungan antara variabel bebas (*independent*) dengan variabel terikat (*dependent*). Dengan analisis regresi berganda maka dapat seberapa besar variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat (Sarwono; 2017:158).

Teknis analisis data untuk analisis efektivitas dan efisiensi anggaran belanja pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2024 dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan, antara lain:

1. Pendekatan kuantitatif

Pendekatan kuantitatif menggunakan data numerik untuk mengukur efektivitas dan efisiensi anggaran belanja. Data yang digunakan dapat berupa data anggaran, data realisasi anggaran, dan data indikator

kinerja. Teknik analisis data kuantitatif yang dapat digunakan untuk analisis efektivitas dan efisiensi anggaran belanja antara lain:

a. Analisis Rasio

Analisis rasio digunakan untuk membandingkan dua atau lebih besaran data. Rasio yang dapat digunakan untuk analisis efektivitas dan efisiensi anggaran belanja antara lain:

- a) Rasio anggaran terhadap realisasi
- b) Rasio realisasi terhadap output
- c) Rasio output terhadap sasaran

b. Analisis Regresi

Analisis regresi digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua atau lebih variabel. Analisis regresi dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh anggaran terhadap output atau kinerja.

c. Analisis *Cost-Benefit Analysis*

Analisis *Cost-Benefit Analysis* (CBA) digunakan untuk membandingkan biaya dan manfaat dari suatu program atau proyek. CBA dapat digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi anggaran belanja.

2. Pendekatan kualitatif

Pendekatan kualitatif menggunakan data non-numerik untuk mengukur efektivitas dan efisiensi anggaran belanja. Data yang digunakan dapat berupa data wawancara, data observasi, dan data dokumen.

Teknik analisis data kualitatif yang dapat digunakan untuk analisis efektivitas dan efisiensi anggaran belanja antara lain:

a. Analisis isi

Analisis isi digunakan untuk menganalisis isi dari data kualitatif. Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis kebijakan anggaran, dokumen anggaran, dan laporan kinerja.

b. Analisis tema

Analisis tema digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama dari data kualitatif. Analisis tema dapat digunakan untuk menganalisis wawancara, observasi, dan dokumen

c. Analisis kasus

Analisis kasus digunakan untuk mempelajari suatu kasus secara mendalam. Analisis kasus dapat digunakan untuk mempelajari kasus anggaran yang tidak efektif atau tidak efisien.

d. Pendekatan campuran

Pendekatan campuran menggunakan kombinasi dari pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan campuran dapat digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang efektivitas dan efisiensi anggaran belanja.

Teknik analisis data campuran yang dapat digunakan untuk analisis efektivitas dan efisiensi anggaran belanja antara lain:

a. Analisis multivariat

Analisis multivariat digunakan untuk menganalisis hubungan antara beberapa variabel. Analisis multivariat dapat digunakan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi anggaran belanja dari berbagai perspektif.

b. Analisis model kausal

Analisis model kausal digunakan untuk menganalisis hubungan sebab-

akibat antara dua atau lebih variabel. Analisis model kausal dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh anggaran terhadap efektivitas dan efisiensi.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu digunakan untuk menganalisis pelaksanaan anggaran belanja dengan menggunakan pengukuran efektivitas dan efisiensi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Barat Daya

4.1.1 Sejarah Singkat BPKSDM Aceh Barat Daya

Badan Kepegawaian pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Barat Daya merupakan sebuah instansi Pemerintah yang bertugas menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan daerah dibidang pengembangan sumber daya manusia, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Aceh Barat Daya.yang berlokasi di Jalan Bukit Hijau Komplek Perkantoran Abdy Blangpidie, 23764.

BKPSDM Aceh Barat Daya yang terbentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya Juncto Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Aceh Barat Daya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai struktur organisasi yang ditetapkan dan untuk melaksanakan program dan kegiatan diperlukan sumber daya aparatur agar dapat mewujudkan visi dan misi daerah yang diemban, sumber daya aparatur BKPSDM Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan satu kesatuan individu dalam melakukan kerjasama melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Tahun 2022. Untuk mewujudkan keberhasilan dalam mencapai tujuan dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, terampil, disiplin serta inovatif.

4.1.2 Visi dan Misi BKPSDM Aceh Barat Daya

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Maka Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Barat Daya telah menandatangani Perjanjian Kinerja untuk memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Tahapan perencanaan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Barat Daya dari Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017 - 2022 yang pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan strategis untuk meningkatkan kinerja serta cara penyampaian melalui pembaharuan dan perbaikan terhadap system kebijakan termasuk pembinaan terhadap akhlak dan perilaku aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Visi Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu “BERSAMA KITA WUJUDKAN ACEH BARAT DAYA YANG SEJAHTERA DAN ISLAMI” dengan berpedoman pada arah pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana tertuang dalam RPJM 2017 - 2022, capaian pembangunan tahun 2017 - 2022 memperhatikan kondisi masyarakat kabupaten Aceh Barat Daya saat ini. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dimasa depan, serta dengan memperhitungkan faktor startegis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta pemerintah daerah. Visi Kabupaten Aceh Barat Daya juga mempunyai semangat untuk menjalankan komitmen pembangunan nasional sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Presiden Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya menginginkan agar setiap pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2017 - 2022.

Misi yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Adapun Penjabaran dari visi tersebut, ada 9 (sembilan) Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Periode 2017 - 2022, adalah sebagai berikut :

1. Mengimplementasikan nilai - nilai keislaman dalam tatanan kehidupan masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan syariat islam.
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
3. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sektor riil pertanian, perkebunan, kelautan, usaha kecil dan menengah serta memfasilitasi berdirinya lembaga keuangan syariah
4. Menciptakan peluang kerja baru melalui pemanfaatan potensi daerah yang berbasis kearifan lokal.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan wilayah sebagai akses percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan memberikan dukungan maksimal terhadap pendidikan formal dan informal.
7. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk mewujudkan masyarakat Aceh Barat Daya yang sehat.
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat rentan melalui pemenuhan kebutuhan sosial.
9. Meningkatkan kreatifitas kepemudaan dan kebijakan yang responsive gender.

Rumusan Misi Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya untuk 5 tahun kedepan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDM mengacu pada “**Misi ke 2 yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi**”.

4.1.3 Tugas dan Fungsi BKPSDM Aceh Barat Daya

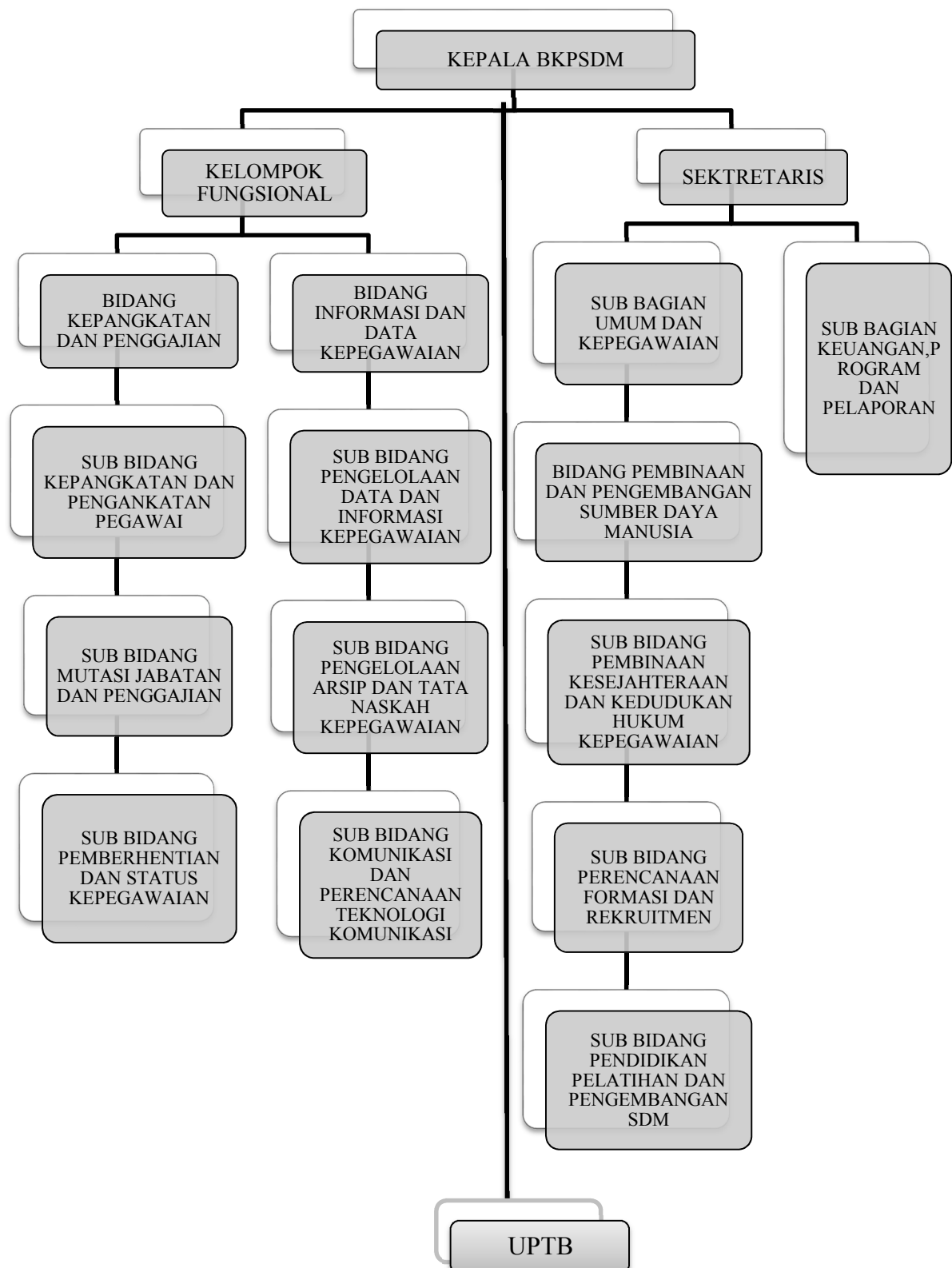
“ Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Barat Daya mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah”

BKPSDM Kabupaten Aceh Barat Daya dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi, diantaranya:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2. Pelaksanaan urusan ketatausahaan badan
3. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan Jangka panjang
4. Perumusan kebijakan teknis kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta evaluasi
5. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil
6. Pelayanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
7. Penyiapan penyusunan rancangan qanun di bidang kepegawaian sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah
8. Penyusunan Formasi dan Pengadaan Pegawai
9. Penyiapan mutasi jabatan struktural instansi pemerintah daerah
10. Pembinaan dan Pengembangan jabatan fungsional

11. Penyiapan dan pelayanan administrasi serta pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
12. Penyelenggaraan rekrutmen dan seleksi pendidikan tenaga kader dan Diklat Kepemimpinan
13. Penyelenggaraan administrasi mutasi wilayah kerja PNS
14. Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan manajemen kepegawaian
15. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai
16. Penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan serta perumahan pegawai sesuai dengan norma, standar prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan
17. Penyelenggaraan administrasi kepangkatan pegawai
18. Penyusunan kebijakan pembinaan disiplin dan penilai kinerja aparatur
19. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah
20. Penyusunan pelaporan badan
21. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur Organisasi BKPSDM Kabupaten Aceh Barat Daya



Sumber : BKPSDM, Aceh Barat Daya (2024)

4.2.1 Analisis Rasio Keuangan BKSDM Aceh Barat Daya

4.2.1.1 Rasio Efektivitas

Analisis efektivitas menggambarkan tingkat keberhasilan pemerintah dalam merealisasikan anggaran belanja daerah yang sudah direncanakan dan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi persentase rasio efektivitas anggaran belanja daerah, maka semakin baik pula kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan hasil analisis kinerja pada keuangan pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber daya Manusia (BKPSDM) Aceh Tahun 2020 - 2022, maka Rasio efektivitas sebagai berikut, Mahsun (2009):

1. Tahun 2020

$$\begin{aligned}\text{Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp.3.402.530.323}}{\text{Rp.3.623.466.146}} \times 100\% = 93,90\%\end{aligned}$$

2. Tahun 2021

$$\begin{aligned}\text{Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp.5.891.477.616}}{\text{Rp.6.717.912.741}} \times 100\% = 87,70\%\end{aligned}$$

3. Tahun 2022

$$\begin{aligned}\text{Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp.5.566.977.948}}{\text{Rp.6.142.181.05}} \times 100\% = 90,63\%\end{aligned}$$

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 4.1 rasio efektivitas sebagai berikut:

Tabel 4.1
Anggaran dan Realisasi Anggaran BKPSDM Aceh Barat Daya

Tahun Anggaran 2020 - 2022

Tahun	Realisasi Anggaran Belanja (Rp)	Target Anggaran Belanja (Rp)	Tingkat Efektivitas
2020	3.402.530.323	3.623.466.146	93,90%
2021	5.891.477.616	6.717.912.741	87,70%
2022	5.566.977.948	6.142.181.056	90,63%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran BKPSDM Aceh Barat Daya (data diolah, 2024)

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2020 anggaran belanja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Barat Daya sebesar Rp. 3.623.466.146 dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 3.402.530.323 dengan tingkat persentase atau 93,90% dari total anggaran belanja. Pada Tahun 2021 anggaran belanja sebesar Rp. 6.717.912.741 dengan realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 5.891.477.616 dengan tingkat persentase atau 87,70% dari total anggaran belanja. Dan pada Tahun 2022 Anggaran belanja sebesar Rp. 6.142.181.056 dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 5.566.977.948 dengan tingkat persentase atau 90,63% dari total anggaran belanja.

4.2.1.2 Rasio Efisiensi

Efisiensi secara umum adalah suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya/sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Analisis efisiensi menggambarkan kemampuan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan menggunakan sumber daya yang lebih hemat. Berdasarkan halis analisis

kinerja keuangan pada BKPSDM Aceh Barat Daya Tahun 2020 - 2022, maka Rasio Efisiensi sebagai berikut:

1. Tahun 2020

$$\begin{aligned}\text{Efisiensi} &= \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp}3.378.266.323}{\text{Rp}3.402.530.323} \times 100\% = 99,29\%\end{aligned}$$

2. Tahun 2021

$$\begin{aligned}\text{Efisiensi} &= \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp}5.491.844.386}{\text{Rp}5.891.477.616} \times 100\% = 93,21\%\end{aligned}$$

3. Tahun 2022

$$\begin{aligned}\text{Efisiensi} &= \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp}5.076.953.937}{\text{Rp}5.566.977.948} \times 100\% = 91,20\%\end{aligned}$$

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 4.2 rasio efisiensi sebagai berikut:

Tabel 4.2
Anggaran dan Realisasi Anggaran BKPSDM Aceh Barat Daya
Tahun Anggaran 2020 - 2022

Tahun	Realisasi Anggaran Belanja Langsung (Rp)	Realisasi Anggaran Belanja (Rp)	Tingkat Efisiensi
2020	3.378.266.323	3.402.530.323	99,29%
2021	5.491.844.386	5.891.477.616	93,21%
2022	5.076.953.937	5.566.977.948	90,20%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran BKPSDM Aceh Barat Daya (data diolah, 2024)

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2020 anggaran belanja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Barat Daya sebesar Rp. 3.378.266.323 dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 3.402.530.323 dengan tingkat persentase atau 99,29% dari total anggaran belanja. Pada Tahun 2021 anggaran belanja sebesar Rp. 5.491.844.386 dengan realisasi anggaran belanja sebesar Rp 5.891.477.616 dengan tingkat persentase atau 93,21% dari total anggaran belanja. Dan

pada Tahun 2022 Anggaran belanja sebesar Rp 5.076.953.937 dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp5.566.977.948 dengan tingkat persentase atau 91.20% dari total anggaran belanja.

4.3 Analisis dan Evaluasi

4.3.1 Analisis Efektivitas Anggaran BKPSDM Aceh Barat Daya

Efektivitas anggaran Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Barat Daya dari tahun 2020 - 2022 di tunjukkan dalam Tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3

Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Anggaran BKPSDM Aceh Barat daya

Tahun	Realisasi Anggaran Belanja (Rp)	Target Anggaran Belanja (Rp)	Tingkat Efektivitas	Kriteria
2020	3.402.530.323	3.623.466.146	93,90%	Efektif
2021	5.891.477.616	6.717.912.741	87,70%	Kurang Efektif
2022	5.566.977.948	6.142.181.056	90,63%	Efektif

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran BKPSDM Aceh Barat Daya (Data diolah, 2024)

Berdasarkan Tabel 4.3 mengenai realisasi anggaran Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Barat Daya Tahun 2020 - 2022 dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2020 realisasi anggaran Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya (BKPSDM) Aceh Barat Daya sebesar Rp. 3.402.530.323 dari total anggaran BKPSDM Aceh Barat Daya sebesar Rp. 3.623.466.146 dengan tingkat persentase 93,90%, yang artinya masih ada sisa anggaran sebesar Rp. 220.935.823 yang tidak digunakan oleh BKPSDM Aceh Barat Daya. Dapat disimpulkan efektivitas pelaksanaan realisasi anggaran Tahun 2020 pada BKPSDM Aceh Barat Daya dapat dikatakan cukup efektif..
2. Pada tahun 2021 realisasi anggaran Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya (BKPSDM) Aceh Barat Daya sebesar Rp. 5.891.477.616 dari total anggaran BKPSDM Aceh Barat Daya sebesar Rp. 6.717.912.741 dengan tingkat persentase 87,70% yang artinya masih ada sisa anggaran sebesar Rp. 826.435.125 yang tidak digunakan oleh BKPSDM Aceh Barat Daya. Dapat disimpulkan efektivitas

pelaksanaan realisasi anggaran Tahun 2021 pada BKPSDM Aceh Barat Daya dapat dikatakan cukup efektif.

3. Pada tahun 2022 realisasi anggaran Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya (BKPSDM) Aceh Barat Daya sebesar Rp. 5.566.977.948 dari total anggaran BKPSDM Aceh Barat Daya sebesar Rp. 6.142.181.056 dengan tingkat persentase 90,63% yang artinya masih ada sisa anggaran sebesar Rp. 575.203.108 yang tidak digunakan oleh BKPSDM Aceh Barat Daya. Dapat disimpulkan efektivitas pelaksanaan realisasi anggaran Tahun 2022 pada BKPSDM Aceh Barat Daya dapat dikatakan cukup efektif..

4.3.2 Analisis Efisiensi Anggaran BKPSDM Aceh Barat Daya

Efisiensi anggaran Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Barat Daya dari Tahun 2020 - 2022 ditunjukkan dalam Tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.4

Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Anggaran BKPSDM Aceh Barat daya

Tahun	Realisasi Anggaran Belanja Langsung (Rp)	Realisasi Anggaran Belanja (Rp)	Tingkat Efisiensi	Kriteria
2020	3.378.266.323	3.402.530.323	99,29%	Kurang Efisien
2021	5.491.844.386	5.891.477.616	93,21%	Kurang Efisien
2022	5.076.953.937	5.566.977.948	90,20%	Kurang Efisien

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran BKPSDM Aceh Barat Daya (Data diolah, 2024)

Berdasarkan Tabel 4.4 mengenai realisasi anggaran Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Barat Daya Tahun 2020 - 2022 dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2020 realisasi anggaran Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya (BKPSDM) Aceh Barat Daya sebesar Rp. 3.402.530.323 dari total anggaran BKPSDM Aceh Barat Daya sebesar Rp. 3.378.266.323 dengan tingkat persentase

99,29%, yang artinya masih ada sisa anggaran sebesar Rp. 24.264.000 yang tidak digunakan oleh BKPSDM Aceh Barat Daya. Dapat disimpulkan efisiensi pelaksanaan realisasi anggaran Tahun 2020 pada BKPSDM Aceh Barat Daya dapat dikatakan Kurang Efisien.

2. Pada tahun 2021 realisasi anggaran Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya (BKPSDM) Aceh Barat Daya sebesar Rp. 5.891.477.616 dari total anggaran BKPSDM Aceh Barat Daya sebesar Rp. 5.491.844.386 dengan tingkat persentase 93,21% yang artinya masih ada sisa anggaran sebesar Rp. 399.633.230 yang tidak digunakan oleh BKPSDM Aceh Barat Daya. Dapat disimpulkan efisiensi pelaksanaan realisasi anggaran Tahun 2021 pada BKPSDM Aceh Barat Daya dapat dikatakan Kurang Efisien.
3. Pada tahun 2022 realisasi anggaran Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya (BKPSDM) Aceh Barat Daya sebesar Rp. 5.566.977.948 dari total anggaran BKPSDM Aceh Barat Daya sebesar Rp. 5.076.953.937 dengan tingkat persentase 91,20% yang artinya masih ada sisa anggaran sebesar Rp. 490.024.011 yang tidak digunakan oleh BKPSDM Aceh Barat Daya. Dapat disimpulkan efisiensi pelaksanaan realisasi anggaran Tahun 2022 pada BKPSDM Aceh Barat Daya dapat dikatakan Kurang Efisien.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Barat Daya Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022, dinilai untuk Tahun 2020 dan 2022 dengan nilai ” Efektif” sebesar 93,90% dan 90,63% dan Tahun 2021 dengan nilai “Cukup Efektif” sebesar 87,70%.
2. Perkembangan tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Barat Daya Tahun 2020 - 2022, untuk Tahun 2020 - 2022 dengan nilai ” Kurang Efisien”. Dengan tingkat persentase masing-masing dalam tahun tersebut sebesar 99,29% dan 93,21% serta 91,20% .

5.2 Saran

1. Diharapkan kepada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Barat Daya harus berusaha lebih meningkatkan kinerja pengelolaan terhadap realisasi anggaran belanja ditahun anggaran berikutnya agar pelaksanaan realisasi anggaran tercapai dengan target anggaranyangtelahditetapkan,

dapat meningkatkan tingkat efektifitas agar tahun berikutnya masuk dalam kriteria sangat efektif, dan juga untuk meningkatkan efisiensi ditahun berikutnya.

2. Penyerapan anggaran belanja pada BKPSDM Aceh Barat Daya Tahun 2020-2022 telah dilakukan dengan analisis menunjukkan penggunaan anggaran yang efisiensi dan efektivitas . Hal ini diharapkan BPKSDM Aceh Barat Daya melaksanakan program dan kegiatannya dengan baik dan maksimal serta menyesuaikan dengan pemberian anggaran sehingga penggunaan anggaran belanja BKPSDM Aceh Barat Daya kedepannya memberikan pengaruh yang baik untuk tahun-tahun selanjutnya.
3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti cakupan penelitian yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2018). Bank Syariah dan Teori kePrakteknya. Jakarta - IAIN Kudus Repository
- Astuti, W. (2022). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Manado. *Jurnal Berkala ilmiah Efisiensi*, Vol. 16, No. 3, 616-623.
- Depdagri, Kemendagri Nomor. 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
- Halim, Abdul. (2012). Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hanum, Zulia. (2011). Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Manajemen & Bisnis* Vol. 11, No. 01 Hal: 40-52.
- Herlianto, Didit. (2011). Teknik Penyusunan Anggaran Operasional Perusahaan. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Mardiasmo. (2014). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. (2020). Perpajakan Edisi Revisi 2020. Yogyakarta: Andi. Artikel *Jurnal*
- Mahsun, Mohamad. (2009). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE
- Mahmudi. (2013). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Aderah Edisi Dua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- M.Fuad, dkk (2020:20) - Pengertian Anggaran Perusahaan
- Nani Darmayanti (dalam Muslihin 2013) definisi operasional adalah rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembahasan dan penelitian karya ilmiah.
- Novia Dhiniharitsa. (2021). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja (studi empiris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 9(1), 1-10.
- Rahmawati, R., & Ishak, I. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas program Pengembangan Sumber Daya Manusia. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 12(2), 103-112.

Rahmawati, R., & Ishak, I. (2023). Dampak program Pengembangan Sumber Daya Manusia terhadap kepuasan kerja karyawan. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 15(1), 93-102.

Republik Indonesia. 2004. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta: Legalitas.

Sarwono, (2017). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(1), 1-10.

Sekaran, U., & Bougis, A. (2019). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 21(2), 113-124.

Supriyanto, (2020). Teknologi Keuangan dalam budgeting: Sebuah kajian teoritis. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 17(2), 174-190.

Sumarsono, Sonny 2010. Manajemen Keuangan Pemerintahan. Yogyakarta:Graha Ilmu

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung.

Tiara Rindhi Firana, (2021). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 26(2), 1-10.

Lampiran
Realisasi Anggaran Berdasarkan Program/Kegiatan Tahun 2020

NO	KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	626.307.000	530.296.300	15,32
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.175.000	7.161.000	0,19
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.000.000	87.277.400	32,86
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	224.950.000	173.564.000	22,84
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	9.000.000	9.000.000	0,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	14.970.000	0,20
	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000	4.000.000	0,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.160.000	900.000	58,33
	Penyediaan Makanan dan Minuman	16.000.000	15.999.500	0,00
	Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	213.022.000	212.434.400	0,28
	Penyediaan Alat-alat Kebersihan Kantor	5.000.000	5.000.000	0,00
2	Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur	26.500.000	26.360.000	0,52
	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	14.500.000	13.860.000	1,00
	Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	7.500.000	7.500.000	0,00
	Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	-	-	0,00
	Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor	5.000.000	5.000.000	0,00
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	12.000.000	12.000.000	0,58
	Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	7.000.000	7.000.000	0,11
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	5.000.000	5.000.000	28,50
	Penyusunan Standar Operasional Pelayanan (SOP)	-	-	0,00
4	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	0	0	0,00
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	0	0	0,00
	Bimtek Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	0	0	0,00
	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNSD(Gol.I/II dan III)	0	0	0,00
5	Program Fasilitas Pindah /Purna Tugas PNS	24.400.000	24.264.000	0,55
	Pemulangan Pegawai Pensiun	24.400.000	24.264.000	0,55
6	Program Pengembangan Data /Informasi	135.575.000	130.079.000	4,05
	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian	100.490.000	94.994.000	5,46
	Pengembangan E-Kinerja	35.085.000	35.085.000	0,00
7	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	758.390.600	704.521.600	7,10
	Seleksi Penerimaan Calon PNS	203.646.600	203.646.600	0,00
	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	228.000.000	228.000.000	0,00
	Profil pegawai Negeri Sipil	0	0	0,00
	Konseling Pembinaan PNS dan Proses Penanganan Kasus-Kasus PNS	25.000.000	25.000.000	0,00
	Pelaksanaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian	0	0	0,00
	Penyusunan Buku Analisis Kebutuhan Tenaga Pendidikan,Kesehatan dan Teknis Lainnya	0	0	0,00
	Penyelesaian Ujian Dinas dan UPKP	32.695.000	32.695.000	0,00
	Pelayanan Administrasi Mutasi ,Kepangkatan dan Pengajian	74.119.000	75.150.000	1,30
	Pengangkatan dan Pelantikan PNS dalam Jabatan Struktual	190.000.000	137.100.000	0,00
	Penyerahan secara simbolis SK CPNS/PNS dan Pengangkatan Sumpah PNS	0	0	0,00
	Pendidikan Penjenjangan Struktual bagi PNSD (PIM II,III dan IV)	0	0	0,00
	Seleksi Pegawai Pemerintahan dengan Penjanjian Kerja (PPPK)	0	0	0,00
	Penilaian dan Pemberian Penghargaan bagi PNS dan SKPK yang	0	0	0,00
	TOTAL	3.623.466.146	3.402.530.323	93,90

Sumber : BKPSDM, Aceh Barat Daya (2024)

Lampiran
Realisasi Anggaran Berdasarkan Program/Kegiatan Tahun 2021

NO	KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
		6.717.912.741	5.891.477.616	87,70
		5.117.912.989	4.368.525.088	14,64
		3.971.123.363	3.349.133.909	15,66
	Perencanaan Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.506.018	10.393.914	1,07
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.638.764	2.528.486	4,18
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.736.004	1.736.320	0,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.760.004	1.759.740	0,01
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	879.720	878.250	0,17
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	879.542	879.450	0,01
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.611.668	2.611.668	0,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.878.801.919	2.303.623.357	19,98
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.878.801.919	2.303.623.357	19,98
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	43.999.789	39.786.581	9,58
1	Pemulangan Pegawai Pensiun	43.999.789	39.786.581	9,58
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	-	-	0,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	525.080.255	5.17.659.519	1,41
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.515.490	3.315.680	5,68
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	320.993.290	314.682.130	1,97
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.276.758	22.269.566	0,03
4	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	26.395.717	26.253.035	0,54
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.800.000	1.800.000	0,00
6	penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.099.000	149.339.108	0,51
7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	0	0	0,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	468.720.668	433.866.769	7,44
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.865.000	10.340.000	4,83
2	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik	112.620.000	106.141.101	5,75
3	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	345.235.668	317.385.668	8,07
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	44.014.714	43.803.769	0,48
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13.183.940	13.183.000	0,35
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.500.000	17.335.000	0,94
3	Pemeliharaan /Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.330.774	13.330.769	0,00
		1.146.789.626	1.019.391.179	11,11
	Pengadaan,Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	393.678.524	359.846.649	8,59
1	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	197.996.270	147.23.804	11,98
2	Fasilitas Lembaga Profesi ASN	79.815.245	71.225.782	10,76
3	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	91.843.689	90.443.743	1,52
4	Pengelolaan Badan Kepegawaian	7.743.639	7.743.639	0,00
5	Evaluasi Data,informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	16.279.681	16.159.681	0,74
	Mutasi dan Promosi ASN	399.979.565	352.342.502	11,91
1	pengelolaan Mutasi ASN	30.799.730	25.520.516	17,14
2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	87.180.599	71.138.744	18,40

NO	KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
3	Pengelolaan Promosi ASN	281.999.236	255.368.276	9,33
	Pengembangan Kopetensi ASN	222.322.255	201.268.276	9,43
1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	22.937.655	22.021.660	3,99
2	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	199.384.600	179.346.616	10,05
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	130.809.282	105.833.752	19,09
1	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	114.397.528	90.964.809	20,48
2	Pengelolaan Penyelesaian Penganggaran Disiplin ASN	16.411.754	14.864.809	9,43
		1.599.999.752	1.522.952.528	4,82
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	1.599.999.752	1.522.952.528	4,82
	Total	6.717.912.741	5.891.477.616	87,7

Sumber : BKPSDM, Aceh Barat Daya (2024)

Lampiran
Realisasi Anggaran Berdasarkan Program/Kegiatan Tahun 2022

NO	KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.485.101.125	3.402.265.102	97,62
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.608.818	19.519.818	99,55
1	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	8.589.706	8.529.706	99,30
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.019.846	2.994.846	99,17
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.699.846	1.699.846	100,00
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.499.720	1.499.720	100,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.499.720	1.499.720	100,00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.299.980	3.295.980	99,88
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.626.524.005	2.588.964.996	98,57
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.626.524.005	2.588.964.996	98,57
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	41.799.296	41.423.568	99,10
1	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	41.799.296	41.423.568	99,10
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	309.377.013	307.901.680	99,52
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.454.858	3.454.858	100,00
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.797.336	74.634.582	99,78
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	68.214.875	67.849.876	99,46
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.387.944	26.387.944	100,00
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	1.800.000	100,00
6	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi dan Konsultasi SKPD	134.722.000	133.774.420	99,30
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	412.578.530	369.255.377	89,50
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.933.200	10.933.200	100,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	113.080.000	102.206.847	90,38
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	288.565.330	256.115.330	88,75
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.213.463	75.199.663	99,98
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.988.402	25.987.602	100,00
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	27.987.000	27.974.000	99,95
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.238.061	21.238.061	100,00
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.561.817.200	1.172.986.082	75,10
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	666.593.943	448.600.443	67,30
1	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	330.395.481	145.131.101	43,93
2	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	122.999.187	106.056.267	86,23
3	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	98.199.692	86.397.852	87,98
4	Pengelolaan Data Kepegawaian	24.999.799	22.293.399	89,17
5	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	89.999.784	88.721.824	98,58
	Mutasi dan Promosi ASN	401.283.855	346.929.426	86,45
1	Pengelolaan Mutasi ASN	49.999.509	36.879.943	73,76
2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	141.284.973	127.841.610	90,48
3	Pengelolaan Promosi ASN	209.999.373	182.207.873	86,77
	Pengembangan Kompetensi ASN	377.939.112	281.163.592	74,39
1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	127.939.478	113.183.558	88,47
2	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	249.999.634	167.980.034	67,19
3	Koordinasi dan Kerjasama pelaksanaan Diklat	-	-	0,00
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	116.000.290	96.292.621	83,01
1	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	86.000.698	74.669.350	86,82
2	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	29.999.592	21.623.271	72,08

NO	KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.095.262.731	991.726.764	90,55
	Pengembangan Kompetensi Teknis	504.197.091	420.417.524	83,38
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	504.197.091	420.417.524	83,38
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	591.065.640	571.309.240	96,66
1	Penyelenggara Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	591.065.640	571.309.240	96,66
		6.142.181.056	5.566.977.948	90,64

Sumber : BKPSDM, Aceh Barat Daya (2024)